

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan pengajuan hipotesis. Penulisan dari bab ini akan disajikan sebagai berikut, pertama adalah tinjauan pustaka guna untuk memamparkan konsep dari variable yang diteliti, kedua adalah penelitian terdahulu, selanjutnya akan membahas mengenai kerangka pemikiran teoritis yang menjelaskan model serta hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, lalu diikuti dengan pernyataan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Teori Kemiskinan

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Teori-teori kemiskinan umumnya bermuara pada dua paradigma besar yang juga berpengaruh pada pemahaman mengenai kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Dua paradigma yang dimaksud yakni Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial. Dua paradigma tersebut mempunyai perbedaan yang sangat jelas terutama dalam melihat kemiskinan maupun dalam memberikan solusi penyelesaian masalah kemiskinan. Paradigma yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Paradigma Neo-Liberal

Pada paradigma ini individu dan mekanisme pasar bebas menjadi fokus utama dalam melihat kemiskinan (Syahyuti, 2006:95) *dalam* (Febriana, 2010).

Pendekatan ini menempatkan kebebasan individu sebagai komponen penting dalam suatu masyarakat. Maka dalam melihat kemiskinan pendekatan ini memberikan penjelasan bahwa kemiskinan merupakan persoalan individu sebagai akibat pilihan-pilihan hidupnya tersebut. Bagi pendekatan ini kekuatan pasar merupakan kunci utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Hal tersebut karena kekuatan pasar yang diperluas dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menghapuskan kemiskinan (Syahyuti, 2006:95) *dalam* (Febriana, 2010).

Dalam pendekatan ini strategi penanggulangan kemiskinan bersifat sementara dan peran negara sangat minimum. Peran negara baru dilaksanakan apabila institusi-institusi di masyarakat, seperti keluarga, kelompok-kelompok swadaya, maupun lembaga-lembaga lainnya tidak mampu lagi menangani kemiskinan. Paradigma ini digerakan oleh Bank Dunia dan telah menjadi pendekatan yang digunakan oleh hampir semua kajian mengenai kemiskinan. Teori-teori modernisasi yang menekan pada pertumbuhan ekonomi dan produksi merupakan dasar teori-teori paradigma ini (Suharto, 2002) *dalam* (Febriana, 2010). Salah satu indikatornya adalah pendapatan nasional (GNP), yang sejak tahun 1950-an mulai dijadikan indikator pembangunan. Para ilmuwan sosial selalu merujuk pada pendekatan ini saat mengkaji masalah kemiskinan suatu negara. Pengukuran kemiskinan kemudian sangat dipengaruhi oleh perspektif *income poverty* yang menggunakan pendapatan sebagai satu-satunya indikator “garis kemiskinan” (Edi Suharto, 2009,138) *dalam* (Febriana, 2010).

Kelemahan paradigma ini adalah terlalu memandang kemiskinan hanya melalui pendapatan dan kurang melibatkan orang miskin sebagai subyek dalam

permasalahan kemiskinan (Satterthwaite, 1997) *dalam* (Febriana, 2010). Hal ini mengakibatkan bentuk-bentuk kemiskinan yang muncul dalam masyarakat kurang mendapatkan perhatian. Bentuk-bentuk kemiskinan yang tidak dapat ditangkap oleh paradigma ini terutama bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh dimensi sosial dalam masyarakat atau kelompok masyarakat. Akibatnya akar permasalahan yang menjadi penyebab kemiskinan juga tidak dapat ditemukan. Namun memang pendekatan *income poverty* ini lebih mudah dilihat dan dikaji karena langsung dapat terukur, serta sasaran pada perbaikan ditingkat individu langsung dirasakan oleh masyarakat miskin.

2. Paradigma Demokrasi-Sosial

Paradigma ini tidak melihat kemiskinan sebagai persoalan individu, melainkan lebih melihatnya sebagai persoalan structural (Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79) *dalam* (Febriana, 2010). Ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakatlah yang mengakibatkan kemiskinan ada dalam masyarakat. Bagi pendekatan ini tertutupnya akses-akses bagi kelompok tertentu menjadi penyebab terjadinya kemiskinan. Pendekatan ini sangat mengkritik sistem pasar bebas, namun tidak memandang sistem kapitalis sebagai sistem yang harus dihapuskan, karena masih dipandang sebagai bentuk pengorganisasian ekonomi yang paling efektif. (Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998:79) *dalam* (Febriana, 2010). Pendekatan ini pula menekankan pada kesetaraan sebagai prasyarat penting dalam memperoleh kemandirian dan kebebasan (Syahyuti, 2006 : 95) *dalam* (Febriana, 2010). Kemandirian dan kebebasan ini akan tercapai jika setiap orang memiliki atau mampu menjangkau sumber-sumber bagi potensi dirinya, seperti

pendidikan, kesehatan yang baik dan pendapatan yang cukup. Kebebasan disini bukan sekedar bebas dari pengaruh luar namun bebas pula dalam menentukan pilihan-pilihan. Disini lah peran negara diperlukan untuk bisa memberikan jaminan bagi setiap individu untuk dapat berpartisipasi dalam transaksi-transaksi kemasyarakatan, dimana mereka dimungkinkan untuk menentukan pilihan-pilihannya dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Peran negara dalam pendekatan ini cukup penting terutama dalam merumuskan strategi untuk menanggulangi kemiskinan. Bagi pendekatan ini kemiskinan harus ditangani secara institusional (kelembagaan), misalnya melalui program jaminan sosial. Salah satu contohnya adalah pemberian tunjangan pendapatan atau dana pensiun, akan dapat meningkatkan kebebasan, hal ini dikarenakan tersedianya penghasilan dasar sehingga orang akan memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dan menentukan pilihan-pilihannya, dan sebaliknya ketiadaan penghasilan dasar tersebut dapat menyebabkan ketergantungan.

Kelemahan teori ini ialah adanya ketergantungan yang tinggi pada negara dalam membentuk struktur dan institusi untuk menanggulangi kemiskinan. Padahal pencapaian pembentukan struktur dan institusi yang tepat dalam menangani kemiskinan itu sendiri tergantung pada kapabilitas kelompok miskin. Penggunaan kemiskinan relatif dalam pendekatan ini juga lebih menyulitkan dalam membentuk kebutuhan standar yang diperlukan oleh kelompok miskin. Hal ini dikarenakan kemiskinan tidak dilihat dari kebutuhan minimal yang harus dicapai tapi lebih pada rata-rata kemampuan penduduk dalam memenuhi

kebutuhan hidupnya. Namun demikian pendekatan ini membuka dimensi lain dari penyebab kemiskinan yaitu pada struktur dan institusi, yang telah menyebabkan tertutupnya akses bagi kelompok tertentu dalam masyarakat. Sehingga melalui pendekatan ini dapat dilihat bahwa akar permasalahan kemiskinan bukan hanya sekedar pada kemampuan individu tetapi bagaimana struktur dan institusi dalam masyarakat memberikan jaminan bagi semua kelompok untuk mendapatkan kesetaraan dalam mencapai kemandirian dan kebebasan. Perbedaan kedua paradigma tersebut dalam melihat kemiskinan maupun penyelesaian masalah kemiskinan sangat terlihat, baik dalam merumuskan penyebab maupun memberikan alternatif solusi mengatasi kemiskinan, seperti terlihat dalam tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1 Perbandingan Teori Neo-Liberal dan Demokrasi-Sosial tentang Kemiskinan

Paradigma	Neo-Liberal	Demokrasi-Sosial
Landasan Teoritis	Individual	Struktural
Konsep dan Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Kelemahan dan pilihan individu; lemahnya pengaturan pendapatan; lemahnya kepribadian (malas, pasrah, bodoh)	Ketimpangan struktur ekonomi dan politik; ketidakadilan sosial
Strategi Penanggulangan Kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran pendapatan terhadap orang miskin secara selektif. - Memberi pelatihan keterampilan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyaluran pendapatan secara universal - Perubahan fundamental dalam pola-pola pendistribusian

	<p>pengelolaan keuangan melalui inisiatif masyarakat dan LSM.</p>	<p>pendapatan melalui negara dan kebijakan sosial.</p>
--	---	--

Sumber: Dikembangkan dari Cheyne, O'Brien dan Belgrave (1998;176) dalam (Febriana, 2010).

Kemiskinan adalah fenomena sosial yang terjadi pada seluruh negara baik negara berkembang maupun negara maju. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan standar kehidupan yang lain (Herbert, 2001) *dalam* (Iskandar, 2012). Sampai saat ini Indonesia masih tetap didera begitu banyak permasalahan yaitu kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan pendapatan. Kusnadi (2009) menguraikan persoalan-persoalan yang mengungkapkan bahwa masalah-masalah yang sering dilihat diantaranya:

1. Kemiskinan, kesenjangan sosial, dan tekanan-tekanan ekonomi yang datang setiap saat
2. Keterbatasan modal, akses teknologi, dan pasar sehingga mempengaruhi dinamika usaha
3. Kelemahan fungsi kelembagaan sosial ekonomi yang ada
4. Kualitas sumber daya manusia yang rendah sebagai akibat keterbatasan akses pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.

Masyarakat pedesaan cenderung mengandalkan kegiatan perekonomiannya pada sektor pertanian dengan cara pengolahannya yang tradisional dan dengan segala keterbatasan fasilitas yang diberikan pemerintah sehingga hasil olahan pertanian tidak maksimal. Kuncoro (1997) mengatakan

bahwa kecenderungan penduduk miskin dari suatu negara dikarenakan oleh ketergantungannya pada sektor pertanian yang subsistem, metode produksi yang tradisional, yang sering dibarengi dengan sikap apatis terhadap lingkungan.

Sharp, et.al *dalam* (Kuncoro, 1997) mencoba mengidentifikasi penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal. Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*) menurut nurkse *dalam* (Kuncoro, 1997): adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktifitas. Rendahnya produktifitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan dan seterusnya.

Kartasasmita (1996) menjelaskan bahwa umumnya masyarakat miskin karakteristiknya terkait lemahnya dalam kemampuan berusaha dan terbatas aksesnya pada kegiatan ekonomi, sehingga semakin tertinggal jauh dari masyarakat lainnya yang mempunyai potensi yang lebih tinggi. Sementara

menurut Soemardjan *dalam* (Sumodiningrat, 1991), menjelaskan berbagai cara pengukuran kemiskinan. Pertama, kemiskinan absolut merupakan suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan, kedua adalah kemiskinan relatif yang merupakan perhitungan kemiskinan berdasarkan proporsi distribusi pendapatan dalam suatu daerah.

Menurut Badan Pusat Statistik kemiskinan adalah ketidakmampuan memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan. Membandingkan tingkat konsumsi penduduk dengan garis kemiskinan atau jumlah rupiah untuk konsumsi orang perbulan. Sedangkan bagi dinas sosial mendefinisikan orang miskin adalah mereka yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan dan mereka yang sudah mempunyai mata pencaharian tetapi tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka yang layak bagi kemanusiaan.

Secara umum kemiskinan dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu, pertama adalah kemiskinan absolut. Kemiskinan yang dikaitkan dengan perkiraan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang hanya dibatasi pada kebutuhan pokok atau kebutuhan dasar minimum yang memungkinkan seseorang untuk hidup layak. Dengan demikian kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang dengan pendapatan yang dibutuhkan untuk memperoleh kebutuhan dasarnya yaitu makanan, pakaian, dan perumahan agar mencapai kelangsungan hidupnya. Kedua ialah kemiskinan relatif, kemiskinan jenis ini

dilihat berdasarkan aspek ketimpangan sosial, karena ada orang yang sudah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimumnya tapi masih jauh lebih rendah dibanding masyarakat sekitarnya (lingkungannya). Semakin besar ketimpangan antara tingkat kehidupan golongan atas dan golongan bawah maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan miskin, sehingga kemiskinan relatif erat hubungannya dengan masalah distribusi pendapatan (BPS, 2011)

2.1.2 Pengeluaran Pemerintah

2.1.2.1 Teori Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Idris Amiruddin, 2018: 35) *dalam* (Setiadi, 2019). Berikut penulis uraikan beberapa teori yang berkaitan dengan pengeluaran pemerintah, yaitu:

1. Teori Adolf Wagner

Adolf Wagner menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah semakin lama semakin meningkat. Tendensi ini oleh Wagner disebut dengan hukum selalu meningkatnya peranan pemerintah. Inti teorinya yaitu makin meningkatnya peran pemerintah dalam kegiatan dan kehidupan ekonomi masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Menurut Wagner ada beberapa yang menyebabkan pengeluaran pemerintah semakin meningkat yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban,

meningkatnya fungsi kesejahteraan masyarakat, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan.

Berkaitan dengan hukum Wagner, dapat dilihat beberapa penyebab semakin meningkatnya pengeluaran pemerintah, yakni meningkatnya fungsi pertahanan keamanan dan ketertiban, meningkatnya fungsi kesejahteraan, meningkatnya fungsi perbankan dan meningkatnya fungsi pembangunan. Teori Wagner mendasarkan pandangannya pada suatu teori yang disebut *organic theory of state* yaitu teori organis yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak terlepas dengan masyarakat lain.

2. Teori Rostow dan Musgrave

Teori ini dikemukakan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut (Idris, 2016: 33). Pada tahap awal persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya.

Pada tahap menengah investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar. Peranan swasta yang semakin besar banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga menyebabkan pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan kualitas yang lebih baik. Pada tahap yang lebih

lanjut aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran untuk kegiatan sosial seperti halnya 9 program kesejahteraan hari tua, program pelayanan masyarakat, dan sebagainya.

3. Peacock dan Wiseman

Teori mereka didasari pada suatu pandangan bahwa pemerintah senantiasa berusaha untuk memperbesar pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka membayar pajak yang semakin besar untuk membiayai pengeluaran pemerintah yang semakin besar tersebut, sehingga teori Peacock dan Wiseman adalah dasar dari teori pemungutan suara. Peacock dan Wiseman mendasarkan teori mereka pada suatu teori bahwa masyarakat memiliki suatu tingkat toleransi pajak, yaitu suatu tingkat di mana masyarakat dapat memahami besarnya pungutan pajak yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sehingga masyarakat menyadari bahwa pemerintah membutuhkan dana untuk membiayai aktivitas pemerintah sehingga mereka mempunyai suatu tingkat kesediaan untuk membayar pajak. Tingkat toleransi ini merupakan kendala bagi pemerintah untuk menaikkan pemungutan pajak.

Menurut Peacock-Wiseman, perkembangan ekonomi menyebabkan pungutan pajak meningkat yang meskipun tarif pajaknya mungkin tidak berubah, pada gilirannya mengakibatkan pengeluaran pemerintah meningkat pula. Dengan demikian, dalam keadaan normal, meningkatnya PDB menyebabkan penerimaan pemerintah menjadi semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah yang akan menjadi semakin besar.

2.1.3 Dana Desa

Salah satu pengeluaran pemerintah guna mendukung program masa pemerintahan Joko Widodo dalam membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat beberapa daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk mengurangi tingkat kemiskinan di pedesaan yaitu Dana Desa.

Ketentuan yang mengatur Dana Desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai pelaksanaan dari ketentuan Pasal 72 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pengalokasian Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Tujuan diberikannya dana desa ialah untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan desa. Kebijakan ini merupakan penyempurna dari seluruh skema pengalokasian dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada. Hal tersebut merupakan visi-misi dari Presiden untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa dalam kerangka NKRI.

Upaya tersebut dilakukan dengan melalui pengalokasian Dana Desa yang lebih fokus pada pengentasan kemiskinan dan mengatasi ketimpangan antar desa. Salah satu aspek penting dari pelaksanaan dana desa adalah penyaluran dana desa

dari APBN ke Pemerintah Desa. Dana desa memang hak pemerintah desa, akan tetapi dalam pelaksanaannya penyaluran Dana Desa tetap melibatkan peran dan fungsi Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan tujuh kewenangannya.

Guna mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta capaian penggunaan Dana Desa, proses penyaluran Dana Desa memiliki beberapa kriteria yang harus di penuhi terlebih dahulu, baik oleh pemerintah desa sebagai pengguna Dana Desa maupun oleh Kabupaten/Kota. Ketentuan terkait penyaluran dana desa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 112/PMK.07/2017 (DJPk 2017).

Sesuai dengan sasaran pembangunan wilayah pedesaan dalam RPJMN 2015-2019, maka penggunaan dana desa perlu diarahkan untuk mendukung pengentasan desa tertinggal demi terwujudnya kemandirian desa. Penggunaan Dana Desa pada dasarnya merupakan hak pemerintah desa sesuai dengan kewenangan dan prioritas kebutuhan masyarakat desa setempat dengan tetap mengedepankan prinsip keadilan. Tetapi dalam rangka mengawal dan memastikan capaian sasaran pembangunan desa, pemerintah menetapkan prioritas penggunaan dana desa setiap tahun.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa pada dasarnya pengalokasian Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Prioritas dari adanya kebijakan dana desa ialah untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan hal tersebut dalam implementasinya kegiatan dana desa diarahkan dan dilaksanakan dengan

cara swakelola, presiden RI secara khusus memberikan perhatian terhadap hal ini. Konsep swakelola dalam arahan presiden ditujukan agar dapat meningkatkan daya beli masyarakat desa yang secara kondisi ekonomi masuk dalam kelompok masyarakat miskin (DJPk 2017).

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pemerataan pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara pedesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pemantauan dan pengawasan juga ditujukan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah.

Supaya pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan. Semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yakni masyarakat desa, Camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa. Untuk tingkat pusat, pengawasan tersebut telah dilakukan sinergi dengan semua pihak. Agar mekanisme pengawasan tersebut semakin efektif maka dimungkinkan diberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan. Dengan adanya sanksi tersebut maka diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya pelanggaran dalam pengelolaan dana desa.

2.1.3.1 Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan bagian dari pembangunan nasional dan pembangunan desa ini memiliki arti dan peranan yang penting dalam mencapai tujuan nasional, karena desa beserta masyarakatnya merupakan basis dan ekonomi, politik, sosial budaya dan pertahanan keamanan.

Menurut Kartasmita (2001: 66) bahwa hakekat pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan dibangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan penggerak pembangunan. Pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah terutama dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikkan taraf hidup dan kesejahteraannya.

Suparno (2001: 46) menegaskan bahwa pembangunan desa dilakukan dalam rangka imbang yang sewajarnya antara pemerintah dengan masyarakat. Kewajiban pemerintah adalah menyediakan prasarana-prasarana, sedangkan selebihnya disandarkan kepada kemampuan masyarakat itu sendiri. Proses pembangunan desa merupakan mekanisme dari keinginan masyarakat yang dipadukan dengan pemerintah. Perpaduan tersebut menentukan keberhasilan pembangunan seperti yang dikemukakan oleh Ahmadi (2001: 222).

Berdasarkan uraian diatas maka penulis data menyimpulkan bahwa pembangunan perlu diarahkan pada pembangunan struktur serta mekanisme

pembangunan desa merupakan sebuah perpaduan yang serasi antara kegiatan partisipasi masyarakat dalam pihak dan kegiatan pemerintah di satu pihak. Bahwa pada hakekatnya pembangunan desa dilakukan oleh masyarakat sendiri. Sedangkan pemerintah memberikan bimbingan, bantuan, pembinaan, dan pengawasan.

2.1.3.2 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Budiman Sudjatmiko, pemberdayaan masyarakat diartikan sebagai tindakan pemberkuasaan rakyat agar mereka mampu secara mandiri menguasai sumber daya yang menjadi milik/haknya guna mensejahterakan hidupnya.

Istilah pemberdayaan, dapat diartikan sebagai upaya memenuhi kebutuhan yang diinginkan oleh individu, kelompok dan masyarakat luas agar mereka memiliki kemampuan untuk melakukan pilihan dan mengontrol lingkungannya agar dapat memenuhi keinginan-keinginannya terhadap sumber daya yang terkait dengan pekejaannya, aktivitas sosialnya, dan lain-lain (Mardikanto dan Soebianto, 2013: 28). Menurut Widjaja pemberdayaan adalah wewenang, pendelegasian wewenang atau pemberian otonomi kejawaran bawah (Widjaja, 2011: 77). Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat (Mardikanto dan Soebianto, 2013: 30).

Sedangkan menurut Adisasmita pemberdayaan merupakan upaya peningkatan profesionalisme dan kinerja pelaku pembangunan di daerah, yang terdiri dari aparatur, lembaga swadaya masyarakat dunia usaha dan masyarakat untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi serta merealisasikan aspirasi dan keragaman masyarakat untuk mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat (Adisasmita, 2011: 131).

Menurut Widjaja pemberdayaan masyarakat adalah upaya peningkatan potensi yang dimiliki oleh masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya (Widjaja, 2010: 169). Dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakatlah yang menjadi aktor dan penentu pembangunan. Dalam kaitan ini, usulan-usulan masyarakat merupakan dasar bagi program pembangunan lokal, regional, bahkan menjadi titik pijak bagi program nasional. Disini masyarakat difasilitasi untuk mengkaji kebutuhan, masalah dan peluang pembangunan dan perikehidupan mereka sendiri.

Dengan demikian pembangunan perlu diletakkan pada pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dilakukan guna menuntaskan masalah kesenjangan berupa pengangguran, kemiskinan, dan ketidakmerataan dengan memberikan ruang dan kesempatan yang lebih besar kepada rakyat banyak untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan.

2.1.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di Indonesia yang telah dilakukan sebelumnya yaitu:

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul	Variabel Penelitian	Persamaan Variabel	Perbedaan Variabel	Hasil Penelitian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Azwardi sukanto (2014)	Efektivitas Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemiskinan di Provinsi Sumatera Selatan	Independen: -Dana bagi hasil -Dana alokasi umm -Belanja pegawai -Alokasi dana desa Dependen: -Kemiskinan	Dependen: -kemiskinan	Independen: -Dana bagi hasil -Dana alokasi umum -Belanja pegawai -Alokasi Dana Desa	Alokasi dana desa berpengaruh negatif (tidak signifikan) terhadap kemiskinan
2.	Lutfi Nur Fahri (2017)	Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa terhadap Manajemen Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa	Independen: -kemiskinan Independen: -Dana desa keuangan desa dependen: -Efektivitas program pembangunan desa	Independen: -Dana desa	Independen: -Keuangan desa Dependen: -Efektivitas program pembangunan desa	Kebijakan dana desa berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap manajemen keuangan desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa
3.	Yanhar Jamaluddin, Asep Sumaryana, Budiman Rusli, Ahmad Buchari (2018)	Analisis Dampak Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan Daerah	Independen: -Dana Desa -Pengelolaan dana desa Dependen: -Pembangunan daerah	Independen: -Dana Desa	Independen: -Pengelolaan Dana Desa Dependen: -Pembangunan daerah	Pengelolaan dan penggunaan dana desa tidak memberi dampak signifikan bagi pertumbuhan pembangunan daerah
4.	Cica Sartika, M.Yani Balaka, dan Wali Aya Rumbia (2016)	Study Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan Masyarakat Desa Lohia Kecamatan Lohia Kabupaten Muna	Independen: -Tingkat Umur -Jumah tanggungan keluarga -pendidikan -pendapatan Dependen: kemiskinan	Dependen: -kemiskinan	Independen: -Tingkat Umur -Jumah tanggungan keluarga -pendidikan -pendapatan	Secara deskriptif terdapat pengaruh tingkat umur, jumlah tanggungan keluarga, pendidikan dan pendapatan terhadap

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						kemiskinan
5.	Ahmad Mustanir, Darmiah (2016)	Implementasi Kebijakan Dana Desa dalam pembangunan di Desa Teteaji Kecamatan Tellu Limpoe Kabupaten Sidenreng Rappang	Independen: -Dana desa -Partisipasi masyarakat Dependen: Pembangunan desa	Independen: -Dana desa -Pembangunan desa	Independen: Partisipasi masyarakat	Implementasi kebijakan dana Desa dengan nilai 69,78 % kategori baik. Partisipasi masyarakat dengan nilai 68,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik. Pembangunan desa dengan nilai 71,4 % dalam penelitian ini berada pada kategori baik.
6.	Made Kembar Sri Budhi (2011)	Analisis faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Bali: Analisis FEM Data Panel	Independen: -Penduduk miskin menamatkan pendidikan SD/SMP -Jumlah penduduk -PDRB -Share pertanian -Share industry pengolahan Dependen: kemiskinan	Dependen: kemiskinan	Independen: -Penduduk miskin menamatkan pendidikan SD/SMP -Jumlah penduduk -PDRB -Share pertanian -Share industry pengolahan	Pendidikan berpengaruh tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Jumlah penduduk, PDRB, share pertanian, dan share industry pengolahan berpengaruh signifikan terhadap jumlah penduduk miskin PDRB dan share industry pengolahan pengaruhnya berlawanan, artinya peningkatan PDRB dan share industry pengolahan meningkatkan jumlah

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						penduduk miskin
7.	Intan Mala Sari, M.Faisal Abdullah (2017)	Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung	Independen: -Dana desa -Alokasi Dana Desa Dependen: kemiskinan	Independen: -Dana Desa Dependen: kemiskinan	Independen: -Alokasi Dana Desa	Hasil FEM menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kemiskinan desa antara tahun 2015-2016 Dana desa berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan desa
8.	Irma Setianingsih (2016)	Kontribusi Dana Desa dalam Menurunkan Angka Kemiskinan di Kabupaten Melawi	Independen: -Dana desa untuk pembangunan -Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat -Dana desa untuk pembinaan Masyarakat Dependen: kemiskinan	Independen: -Dana desa untuk pembangunan -Dana desa untuk pemberdayaan masyarakat Dependen: kemiskinan	Independen: -Dana desa untuk Pembinaan masyarakat	Dana desa dibidang pembangunan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin. Dana desa dibidang pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap jumlah penduduk miskin
9.	Nadia Larasati Aghnia (2018)	Pengaruh Dana Desa dalam Pengentasan Kemiskinan di Indonesia	Independen: -Dana Desa -Pertumbuhan Ekonomi -ketimpangan pendapatan -Tingkat pengangguran terbuka -Indeks Pembangunan	Independen: -Dana Desa Dependen: -Kemiskinan	Independen: -Pertumbuhan Ekonomi -ketimpangan pendapatan -Tingkat pengangguran terbuka -Indeks Pembangunan Manusia	Dana desa berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif signifikan

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			Manusia			terhadap kemiskinan
			Dependen: -Kemiskinan			Ketimpangan pendapatan berpengaruh indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap persentase penduduk miskin
10.	Nilam Indah Susilowati, Dwi Susilowati, Syamsul Hadi (2017)	Pengaruh Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan PDRB terhadap Kemiskinan Kabupaten/ Kota di Jawa Timur	Independen: -Alokasi Dana Desa -Dana Desa -Belanja Modal -PDRB Dependen: -Kemiskinan	Independen: -Dana Desa Dependen: -Kemiskinan	Independen: -Alokasi Dana Desa -Belanja Modal -PDRB	Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Belanja Modal, dan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh terhadap kemiskinan Kabupaten/ Kota

2.2 Kerangka Pemikiran

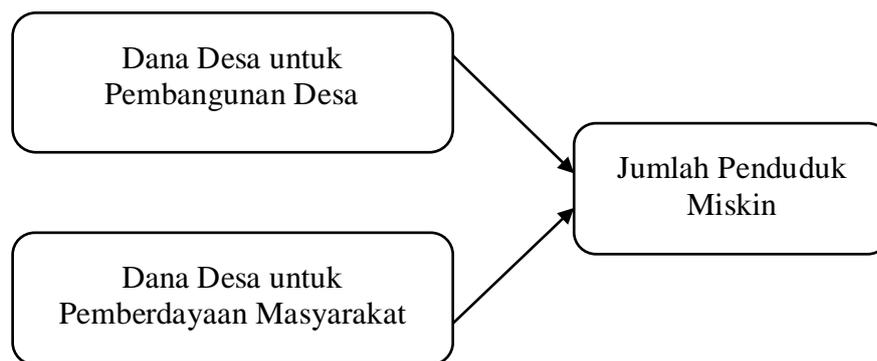
Dalam upaya menurunkan jumlah penduduk miskin pemerintah dituntut untuk aktif guna mewujudkan pembangunan negara. Upaya yang diharapkan bukan hanya sekedar memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, namun yang lebih penting adalah memerangi kemiskinan dari akarnya. Berdasarkan data BPS kemiskinan di Indonesia masih terpusat di wilayah pedesaan, hal tersebut menandakan bahwa ketimpangan semakin melebar dan kemiskinan juga masih tinggi. Dalam upaya menurunkan angka kemiskinan

di Indonesia pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru berupa pemberian bantuan Dana Desa. Harapan dengan dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan berkurang.

Kota Banjar merupakan salah satu dari Kota atau Kabupaten di Indonesia yang mendapatkan bantuan Dana Desa. Kota Banjar memiliki 9 kelurahan dan 16 desa dimana wilayah yang berstatus desa mendapatkan Bantuan Dana Desa dengan harapan dapat meningkatkan perekonomian warga dan meningkatkan pelayanan publik berupa pembangunan baik fisik maupun non fisik dengan tujuan mengurangi jumlah penduduk miskin. Dalam penggunaan dana desa pemerintah desa harus dapat melihat potensi yang ada di wilayahnya, selain itu pemerintah desa harus lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan adalah pembangunan yang berkualitas yaitu sebuah hasil pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat desa setempat.

Hubungan dana desa untuk pembangunan desa berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin, karena peningkatan pelayanan publik berupa pembangunan fisik maka kegiatan perekonomian akan berkembang dan jumlah penduduk miskin menurun. Berkaitan dalam peningkatan perekonomian maka dana desa untuk pemberdayaan masyarakat desa terhadap jumlah penduduk miskin hubungannya negatif, dengan di ikut sertakan nya peran masyarakat dalam penggunaan dana desa hal tersebut dapat menambah pendapatan masyarakat dengan demikian jumlah penduduk miskin berkurang.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh dana desa untuk pembangunan desa terhadap jumlah penduduk miskin dan pengaruh dana desa untuk pemberdayaan masyarakat terhadap jumlah penduduk miskin. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam pembuatan saran dan kebijakan untuk peraturan pemerintah desa agar tepat sasaran. Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan dana desa terhadap kemiskinan desa di Kota Banjar 2015-2018.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara atas penelitian. Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, maka penulis menentukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara parsial berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kota Banjar Tahun 2015-2018.

2. Diduga Dana Desa untuk Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara bersama-sama berpengaruh negatif terhadap Kemiskinan di Kota Banjar Tahun 2015-2018.